

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2019 NOMOR 126

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 2 DESEMBER 2019

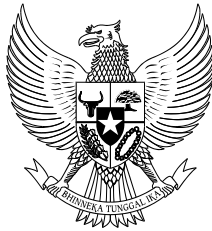
NOMOR : 126 TAHUN 2019

TENTANG : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum

2019



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 126 TAHUN 2019

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 396);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang.....

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
14. Peraturan.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2681);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

3. Peraturan....

3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat.....

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Sosial Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh secara minimal.
12. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

13. Penyanggah.....

13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan masyarakat lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
15. Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
16. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
17. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
18. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
19. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.

20. Perlindungan.....



20. Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.
21. Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
22. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
23. Panti Sosial adalah lembaga atau unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
24. Pusat Kesejahteraan Sosial adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
25. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
26. Tenaga.....

26. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
27. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan tanpa imbalan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) SPM Bidang Sosial dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi Dinas dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM Bidang Sosial.
- (2) SPM Bidang Sosial bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin Mutu Pelayanan Dasar bidang sosial kepada masyarakat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Pelayanan Dasar Bidang Sosial terdiri dari:

a. Jenis.....

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Indikator SPM; dan
- c. target rencana pencapaian SPM.

#### BAB IV

### JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR DAN TARGET RENCANA PENCAPAIAN SPM

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pelayanan Dasar

#### Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Dasar bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a yang diselenggarakan oleh Dinas, merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial terdiri dari:
  - a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti Sosial;
  - b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;
  - c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial;
  - d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
  - e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah.
- (2) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan c terdiri dari:
  - a. tidak....

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; serta
  - b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.
- (3) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
  - b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
  - c. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
  - d. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
- (4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.
- (5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat per satu kali kejadian bencana bagi Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan kriteria:
- a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
  - b. dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau
  - c. adanya surat penetapan bencana dari Wali Kota.

## Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat.
- (2) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud padat ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memberikan dukungan pelayanan dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan
  - b. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.

## Bagian Kedua

### Indikator dan Target Rencana Pencapaian SPM

## Pasal 6

Indikator dan target rencana pencapaian SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 7

Pelaksanaan SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf c diselenggarakan oleh Kepala Dinas.

## BAB V

### PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

#### Pasal 8

- (1) SPM Bidang Sosial yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan Pelayanan Dasar bidang sosial.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman atau standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### Pasal 9

- (1) Dinas menetapkan target pencapaian masing-masing Indikator SPM dalam bagan rencana strategis Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM Bidang Sosial dengan Perangkat Daerah lain.
- (3) Dinas bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang Sosial kepada masyarakat sesuai target pencapaian SPM.
- (4) Dinas menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan Mutu Pelayanan Dasar bidang sosial berdasarkan target tahunan SPM.
- (5) Target tahunan pencapaian SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 100% yang dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM dilakukan oleh Wali Kota melalui sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial dilakukan oleh sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah secara berkala untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, kajian kebijakan, dan laporan Wali Kota kepada menteri dalam negeri dan gubernur.

BAB VII.....

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 2 Desember 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,


ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 126  
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI



  
LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002





LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 126 TAHUN 2019

TENTANG : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL

-----  
 Indikator Dan Target Rencana Pencapaian STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL

NO	KEGIATAN	SASARAN/INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial  Indikator: Persentase (%)  1. penyandang Disabilitas Terlantar; 2. Anak Terlantar; 3. Lanjut Usia Terlantar; dan 4. Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti Sosial  Target:  100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan	Rumus : X = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar ,Anak terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti Y = Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial  $\text{Indikator Kinerja} = \frac{X}{Y} \times 100\%$	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )  Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi Penyandang Disabilitas Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Daerah yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial dikali 100% (seratus persen)

1. Layanan...

1	2	3	4	5
1	Layanan Data dan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. honor petugas</li> <li>b. jumlah petugas</li> <li>c. alat pengolah data (komputer dan printer)</li> <li>d. alat tulis kantor</li> <li>e. sewa jaringan internet</li> </ul>	Rumus = $(a \times b) + c + d + e$	Layanan data dan pengaduan dapat dilakukan oleh diasi sosial dan Pusat Kesejahteraan Sosial atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2	Layanan Kedaruratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. transpor petugas</li> <li>b. pembelian kendaran khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial</li> <li>c. pemeliharaan kendaraan</li> <li>d. honor petugas tim reaksi cepat</li> </ul>	<p>Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial</p> <p>Rumus = <math>c + d</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Layanan kedaruratan dilakukan secara cepat, profesional, dan tuntas serta dapat dilakukan dengan membentuk tim reaksi cepat oleh Dinas.</li> <li>2) Layanan kedaruratan dapat dilakukan di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di kelurahan.</li> </ul>
3	Penyediaan Permakanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penerima layanan pertahun</li> <li>b. jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun</li> <li>c. indeks permakanan perorang perhari</li> <li>d. transpor petugas</li> </ul>	Rumus = $(a \times b \times c) + d$	Layanan permakanan dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di kelurahan.

1	2	3	4	5
4	Penyediaan Sandang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembelian pakaian</li> <li>b. pembelian perlengkapan mandi</li> <li>c. pembelian kebutuhan khusus untuk: perempuan dewasa; balita; dan yang mengalami <i>bedridden</i>.</li> <li>d. pembelian alas kaki</li> <li>e. transport petugas</li> </ul>	Rumus = a+b+c+d+e	Layanan penyediaan sandang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau dipusat kesejahteraan sosial yang berkedudukan di kelurahan.
5	Penyediaan alat bantu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kursi roda</li> <li>b. kaca mata</li> <li>c. jasa pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu</li> <li>d. alat bantu dengar</li> <li>e. kruk</li> <li>f. tripod</li> <li>g. tongkat putih</li> <li>h. reglet(alat tulis untuk tuna netra)</li> <li>i. transpor petugas</li> <li>j. transpor penerima layanan</li> </ul>	Rumus = a+b+c+d+e+f+g+h+i+j	Pembelian jenis alat bantu disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang mengalami disabilitas Layanan penyediaan alat bantu dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di pusat kesejahteraan sosial yang berkedudukan di kelurahan.
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. obat umum</li> <li>b. timbangan</li> <li>c. pengukur tinggi badan</li> <li>d. termometer</li> <li>e. transpor petugas</li> <li>f. transpor penerima layanan</li> </ul>	Rumus = a+b+c+d+e+f	Layanan penyediaan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di pusat kesejahteraan sosial yang berkedudukan di kelurahan.

1	2	3	4	5
7	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Honor pekerja sosial</li> <li>b. Tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial</li> <li>c. Pembelian alat peraga</li> <li>d. Transpor petugas</li> </ul>	Rumus = a+b+c+d	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Layanan pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di pusat kesejahteraan sosial yang berkedudukan di kelurahan, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat.</li> <li>2) Komponen honor pekerja sosial untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial dasar luar Panti Sosial selama 12 (dua belas) bulan</li> <li>3) Komponen tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial untuk pembiayaan layanan pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan perkegiatan</li> <li>4) Transpor petugas untuk pembiayaan perjalanan/transportasi perkegiatan</li> </ul>
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial</li> <li>b. Pembelian alat peraga</li> <li>c. Transpor petugas</li> </ul>	Rumus = a+b+c	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Layanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat dilakukan oleh Dinas Sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di kelurahan, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat</li> <li>2) Komponen tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial untuk pembiayaan layanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat per kegiatan</li> <li>3) Transpor petugas untuk pembiayaan perjalanan/transportasi perkegiatan</li> </ul>

1	2	3	4	5
9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak	a. Transpor Petugas b. Transpor Penerima Layanan	Rumus = a+b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang belum memiliki nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	a. Transpor Petugas b. Transpor Penerima Layanan	Rumus = a+b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan fasilitasi layanan pendidikan (sekolah) dan kesehatan dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Biaya Perjalanan Pekerja Sosial Profesional	Sesuai dengan Standar Biaya	Penelusuran Keluarga merupakan Kegiatan Pencarian Keluarga untuk tujuan reunifikasi
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	a. Biaya Perjalanan atau Transpor Pekerja Sosial Profesional b. Biaya Transpor Penerima Layanan c. Biaya Perjalanan dalam rangka Penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga	Sesuai dengan Standar Biaya	Reunifikasi merupakan pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi
13.	Layanan rujukan	a. Transpor Petugas b. Transpor Penerima Manfaat	Rumus = a+b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan layanan rujukan

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

NO	KEGIATAN	SASARAN/INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	<p>Sasaran:</p> <p>Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial Daerah</p> <p>Indikator:</p> <p>Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah</p> <p>Target:</p> <p>100% (seratus persen) selama 1 (satu) Tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan</p>	<p>Rumus:</p> <p>X = Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</p> <p>Y = Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah</p> <p>Indikator Kinerja = <math>\frac{X}{Y} \times 100\%</math></p>	<p>Sasaran Program (<i>Outcome</i>)</p> <p>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu Tahun anggaran dibagi populasi korban bencana alam dan sosial di Daerah yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah dikali 100% (seratus persen)</p>
1	Penyediaan Permakanan	<p>a. paket pembelian bahan permakanan/makanan siap saji</p> <p>b. biaya perjalanan/transpor petugas</p> <p>c. biaya pengiriman</p> <p>d. perkiraan jumlah Korban Bencana alam dan sosial pertahun</p> <p>e. perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan perkejadian bencana dalam 1 (satu) tahun</p> <p>f. Indeks permakanan perorangan perhari</p>	<p>Rumus = a+b+c</p> <p>a = d x e x f</p>	<p>Perhitungan penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk korban bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana</p>

1	2	3	4	5
2.	Penyediaan Sandang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta <i>family kids</i></li> <li>b. biaya perjalanan/transpor petugas</li> <li>c. biaya pengiriman</li> <li>d. perkiraan jumlah Korban Bencana pertahun</li> <li>e. indeks sandang perorang perkejadian</li> </ul>	<p>Rumus = <math>a + b + c</math></p> <p><math>a = d \times e</math></p>	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana
3.	Penyediaan Tempat Penampung Pengungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi</li> <li>b. biaya perjalanan/transpor petugas</li> <li>c. biaya pengiriman</li> <li>d. perkiraan jumlah Korban Bencana pertahun</li> <li>e. indeks tempat penampungan pengungsi</li> </ul>	<p>Rumus = <math>a + b + c</math></p> <p><math>a = d \times e</math></p>	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana
4.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembelian paket bahan permakanan khusus (Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak)</li> <li>b. Biaya perjalanan/transpor petugas</li> <li>c. Biaya pengiriman</li> <li>d. Perkiraan jumlah kelompok rentan</li> <li>e. Indeks penanganan khusus</li> </ul>	<p>Rumus = <math>a + b + c</math></p> <p><math>a = d \times e</math></p>	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana



1	2	3	4	5
5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	a. pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial b. honor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah Korban Bencana e. Indeks dukungan psikososial	Rumus = a + b + c a = d x e	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana

Sukabumi, 2 Desember 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI